



SUBYEK																																
KORAN/ MAJALAH		KOMPAS					POS KOTA					MAJALAH :					2013															
		SEPUTAR INDONESIA					RAKYAT MERDEKA					GATRA																				
		KORAN TEMPO					REPUBLIKA					TEMPO																				
	✓	INVESTOR DAILY					MEDIA INDONESIA					INVESTOR INDONESIA																				
		BISNIS INDONESIA					SUARA PEMBARUAN					WARTA EKONOMI																				
		KONTAN					NERACA																									
HALAMAN		11																														
TANGGAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BULAN		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGT		SEP		OKT		NOP		DES								

Pembangunan Dua Ruas Tol Dalkot Diprioritaskan

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memprioritaskan pembangunan ruas tol dalam kota (dalkot) Semanan-Sunter dan Sunter Pulogebang. Kebijakan itu ditempuh, selain untuk mengurangi kemacetan di Ibukota, juga bertujuan untuk memperlancar jalur distribusi logistik yang diangkut truk besar dari kontainer ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hal itu saat memimpin rapat yang membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek-Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta, Selasa (5/2) mengungkapkan bahwa keberadaan dua ruas tol dalam kota itu dapat menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan di Ibukota, karena menjadi jalur yang memiliki akses langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok.

"Ruas tol Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang bisa memperlancar distribusi logistik dari dan ke luar Jakarta. Kontainer terbantu dengan adanya ruas jalan tol itu. Tapi sekali lagi, ini masih kita hitung apakah bermanfaat, jangan sampai apa yang kita putuskan itu keliru," kata Jokowi.

Dia mengatakan, pembangunan ruas tol dalam kota Semanan-Sunter yang membentang sepanjang 20,23 kilometer (km) dan Sunter-Pulogebang 9,44 km membutuhkan anggaran sekitar Rp 7,37 triliun. Rencananya, pelaksana pembangunan dua ruas jalan tol ini akan dikerjakan oleh PT Jakarta Tollroad Development (PT JTD). Perusahaan itu nantinya berkolaborasi dengan sejumlah BUMD dan BUMN sebagai investor pembangunan jalan tol.

"Memang belum, tapi pembicaraan telah mengerucut ke sana. Belum ada keputusan," katanya.

Proyek pembangunan dua ruas tol dalam kota Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang direalisasikan terlebih dulu dari rencana pembangunan enam ruas jalan tol yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Lebih lanjut dikatakan, Pemprov tetap konsisten untuk merealisasikan pembangunan empat ruas tol lainnya sebab telah diamanatkan dalam Perda No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DKI 2005-2025.

Pusat Dukung

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak menyatakan, Pemerintah Pusat mendukung rencana Pemprov DKI memprioritaskan pembangunan dua ruas tol dalam kota, yaitu Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang.

"Kedua ruas tol tersebut pantas diprioritaskan pembangunannya karena beban jalan tol menuju pelabuhan saat ini sudah melebihi kapasitas. Kondisi ini jika dibiarkan akan mengganggu dan menghambat lalu lintas di tol karena biaya transportasi barang akan sangat mahal. Nanti buntutnya ke konsumen akhir. Harga barang akan mahal karena beban biaya transportasi barang tinggi," kata Hermanto.

Dia mengatakan, jika biaya transportasi angkutan barang bisa ditekan dan kecepatan jalan juga meningkat, pergerakan ekonomi bisa berlangsung lebih baik. Ditambahkan, saat ini Pemprov DKI sedang memroses izin ling-

kungan untuk pembangunan kedua ruas tol itu. "Izin lingkungan diperlukan sebelum Kementerian Pekerjaan Umum dan pemegang konsesi jalan tol, PT Jakarta Tollroad Development menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol dan konstruksi. Dinas Pekerjaan Umum DKI sudah selesai mengurus izin lingkungan dan tinggal ditandatangani Gubernur Joko Widodo," kata Dardak.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, kehadiran enam ruas tol dalam kota berperan untuk meningkatkan jumlah rasio jalan di Ibukota yang sekarang hanya sebesar 6,25% dari total luas Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030, rasio jalan di Jakarta minimal harus mencapai 12%. (nov)